

ABSTRAK

Sindur Pangestu Santoso (01659210007)

(ix+140 halaman)

TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER TERHADAP DUGAAN MALPRAKTIK MEDIK DALAM MENGHENTIKAN KEHAMILAN TANPA INDIKASI MEDIK

Maraknya praktik penghentian kehamilan (aborsi) tanpa indikasi medik menimbulkan keresahan di masyarakat. Pada dasarnya dokter telah terikat dengan Kode Etik Kedokteran, sehingga, tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan menghilangkan nyawa manusia, seperti aborsi. Namun, pada kenyataannya terjadi dilema pada norma pengaturan pertanggungjawaban hukum dokter dalam tindakan aborsi yang dilakukan. Pasal 75 ayat (1) UU Kesehatan dan Pasal 11 ayat (1) KODEKI melarang penghentian kehamilan tanpa indikasi medik, namun, PP Kesehatan Reproduksi menyatakan penghentian kehamilan dapat dilakukan atas indikasi kedaruratan medis dan/ atau indikasi perkosaan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis bertujuan untuk memastikan penyebab terjadinya disharmonisasi hukum yang mempengaruhi implementasi pertanggungjawaban hukum dokter dalam melakukan aborsi tanpa indikasi medik menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan empiris kepada organisasi profesi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terjadi disharmonisasi peraturan aborsi yang menyebabkan dokter dalam implementasi pertanggungjawaban hukumnya menjadi tidak jelas karena terdapat kebijakan yang melarang aborsi dan memperbolehkan aborsi yaitu berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan/ atau indikasi perkosaan. Maka, dokter dalam melaksanakan pertanggungjawaban hukumnya harus mendasari tindakan aborsi atas indikasi medik, indikasi kedaruratan medis, dan/ atau indikasi perkosaan. Sehingga, apabila melanggar ketentuan pada aturan tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan jenis malpraktik medik yang dilakukan seperti sanksi pidana, perdata disiplin, atau etika sesuai peradilan yang berwenang.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Dokter, Aborsi, Disharmonisasi Aturan, Implementasi

Referensi: 110 (1945-2022)

ABSTRACT

Sindur Pangestu Santoso (01659210007)

(ix+140 pages)

DOCTOR'S LEGAL RESPONSIBILITY ON ALLEGED MEDICAL MALPRACTICE IN STOPPING PREGNANCY WITHOUT MEDICAL INDICATION

The growth of stopping pregnancy (abortion) without medical indication cause the anxiety in society. Basically, doctors are bound to Code of Medical Ethics, so they are not allowed to action to take the human life, such as abortion. However, in reality there is a dilemma in the norms of regulation for the doctor's responsibility for doing the abortions. Article 75 paragraph (1) of Health Law and Article 11 paragraph (1) of KODEKI prohibit the termination of pregnancy without any medical indication, but the pp 61/2014 state that termination of pregnancy can be done based by the medical emergency indication and/ or rape indication. Based on the causes of these problems, the authors aim to ensure the occurrence of legal disharmony that effects to the implementation of the legal responsibility of that do the abortion without medical indication using normative juridical methods with an empirical approach to professional organization. This research concludes that there is disharmony in abortion regulations which make doctors unclear to have the legal responsibility because there are policies that prohibit abortion and the other allow abortion based by medical emergency indication and/ or raped indication. Therefore, doctors in doing their legal responsibility doctors must consider the act of abortion as a medical indication, an indication of medical emergency, and/ or raped indication. Therefore, if doctors do against the rules, the doctor can be subject to sanctions according to type of criminal medical malpractice, civil, disciplinary or ethic based on the choice of the court.

Keywords: Legal Responsibility, Doctors, Abortion, Disharmonization of Rules, Implementation

References: 110 (1945-2022)